

Warisan khulafa' ar-rasyidun: konflik kekuasaan' kodifikasi ilmu, dan pembentukan sistem fiskal islam

Nazhief Yaqzhan Falahie¹, May Auliya Attar², Shofil Fikri³

program studi Hukum Ekonomi Syariah, ³Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nazhieffalahy@gmail.com

Kata Kunci:

Ekonomi, khulafa'ur rasyidun, pendidikan, politik, fiscal islam

Keywords:

Economy; education; khulafa'ur rasyidun, politics, Islamic fiscal

ABSTRAK

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebutuhan akan pemimpin yang sah mendorong penunjukan Khulafa' ar-Rasyidun: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan mereka membawa kebijakan berbeda untuk menjaga stabilitas dan memperluas wilayah Islam. Secara sosial, mereka berupaya menegakkan prinsip kesetaraan, meskipun tetap terjadi gejolak dan perpecahan, terutama pada masa Ali. Dalam bidang keilmuan, periode ini ditandai oleh kodifikasi Al-Qur'an, perkembangan pendidikan, serta perumusan dasar ilmu Nahwu. Dari sisi politik, administrasi negara diperkuat melalui sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, ekspansi wilayah besar-besaran, dan pembentukan angkatan laut

pada masa Usman. Namun, konflik internal terkait keadilan dan nepotisme menjadi tantangan serius. Pada aspek ekonomi, para khalifah menekankan pengelolaan Baitul Mal secara adil, pemerataan harta, serta penerapan sistem fiskal berbasis syariat, yang kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa-masa berikutnya

ABSTRACT

After the death of the Prophet Muhammad (SAW), the need for a legitimate leader led to the appointment of the Rightly Guided Caliphs: Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, and Ali ibn Abi Talib. Their leadership introduced various policies to maintain stability and expand the Islamic state. Socially, they worked to uphold equality, although significant upheavals and divisions still occurred, especially during Ali's rule. In the intellectual sphere, this period saw the codification of the Qur'an, the development of education, and the early formulation of Arabic grammar (Nahwu). Politically, state administration was strengthened through more structured governance, vast territorial expansion, and the establishment of a naval force under Uthman. However, internal conflicts related to justice and nepotism posed major challenges. Economically, the caliphs emphasized fair management of the Baitul Mal, equitable distribution of wealth, and the implementation of a Sharia-based fiscal system, which became a crucial foundation for later Islamic economic development.

Pendahuluan

Khulafa' ar-Rasyidun merupakan pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah pemimpin yang adil dan bijak, sebagaimana teladan dan panutan mereka, yaitu Rasulullah. Mereka selalu memegang teguh pada syariat Islam, serta memiliki rasa kasih sayang dan tutur kata yang lembut (Sunnatullah, 2022). Oleh karena itu, masa ini merupakan titik balik bagi awal kemajuan umat Islam, baik secara keilmuan maupun secara luas wilayah dan jumlah penganut. Khulafa' ar-Rasyidun adalah masa awal kepemimpinan Islam setelah



wafatnya Rasulullah, di mana masa ini dipimpin oleh empat sahabat Nabi sebagai khalifah. Keempat sahabat tersebut adalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah ini memiliki kebijakan serta pencapaian yang berbeda-beda (Muharrom, 2024). Maka, pastinya akan ada juga kelompok-kelompok yang tidak menyukai mereka, baik secara personal ataupun kebijakannya.

Setelah wafatnya Rasulullah, khulafa' ar-rasyidun dipilih melalui dua metode. Metode pertama adalah melalui proses musyawarah. Sementara itu, metode kedua adalah melalui penunjukan dari khalifah sebelumnya (Ambiya et al., 2024). Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan Islam pada masa ini tetap mengutamakan dan memegang teguh ajaran Islam sebagai landasan utama. Penelitian mengenai masa Khilafah ar-Rasyidin telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Beberapa studi berfokus pada ekspansi politik dan militer pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, menunjukkan bagaimana ekspedisi militer berhasil menyatukan Jazirah Arab dan menaklukkan sebagian besar wilayah Romawi Timur dan Persia, yang mengokohkan Islam sebagai kekuatan politik global (Nurjanah, 2023).

Selain itu, ada penelitian lain yang berfokus pada peralihan kekuasaan dari Rasulullah kepada masing-masing khalifah serta perpecahan atau konflik yang muncul akibatnya (Kadenun, 2021). Terdapat pula penelitian yang menyoroti kebijakan ekonomi masing-masing khalifah secara terpisah, misalnya pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (Fauziyah & Kurniawan, 2022). Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas peradaban masa khulafa' ar-rasyidun hanya menitikberatkan pada topik dan khalifah tertentu. Penelitian ini akan membahas empat topik utama peradaban Islam selama masa kepemimpinan Khulafa' ar-Rasyidun, yaitu kondisi sosial, keilmuan, politik dan sistem pemerintahan, serta kebijakan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan perbandingan setiap khalifah berdasarkan

Pembahasan

Setelah wafatnya Rasulullah, dibutuhkan seorang pemimpin untuk umat Islam. Tidak akan ada sosok yang bisa menggantikan posisi Nabi dan Rasulullah SAW. sebagai nabi dan rasul. Namun dalam sebuah negara, pasti dibutuhkan seorang pemimpin. Oleh karena itu, empat sahabat terpilih menjadi pemimpin yang disebut Khulafa' ar-Rasyidun. Pemilihan khalifah ini tidak semua sepakat. Sebelum Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, suku Khazraj sempat menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Di sisi lain, suku Aus mempertimbangkan kaum muhajirin sebagai khalifah. Setelah diadakannya musyawarah, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah melalui jalur aklamasi (Patoni, 2023). Estafet kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Masing-masing khalifah memiliki kebijakan dan pencapaian masing-masing. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab yang akan datang.

Kondisi Sosial

Strata sosial di kalangan masyarakat Arab sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad walaupun belum ada kenabian. Secara umum, masyarakat Arab dibagi

menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah golongan fakir miskin yang didominasi oleh orang Arab berkulit hitam. Golongan kedua adalah para saudagar ((Muftaza & Aziz, 2023). Pada masa pemerintahan para khalifah ar-rasyidin, mereka berusaha menghilangkan perbedaan antar strata sosial dengan menerapkan konsep kesetaraan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, atau jumlah harta seseorang. Konsep kesetaraan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Rasulullah, lalu dilanjutkan oleh para khalifah empat sebagai penerusnya. Pada masa khalifah Abu Bakar, umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak wafatnya Rasulullah dalam pemilihan pemimpin suksesor beliau (Faisal et al., 2022).

Namun Abu Bakar dapat menyelesaikannya dengan sistem musyawarah. Abu Bakar dalam membagi ghanimah (harta rampasan perang) berusaha menerapkan kesetaraan tanpa memandang golongan. Abu Bakar juga menginisiasi pemerataan pajak yang adil serta program bantuan bagi orang miskin dan pengungsi (Al Ayyubi et al., 2024). Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan menghapus strata sosial yang ada sebelumnya. Khalifah Umar juga mengedepankan toleransi antar-umat beragama. Umar mempersilahkan non-muslim di daerah yang dikuasai umat Islam untuk beribadah tanpa gangguan sama sekali. Disamping itu, Umar juga menginisiasi dialog antaragama (Bashayev, 2024). Namun tentunya dalam sebuah masyarakat yang heterogen ada saja ujaran-ujaran kebencian yang dapat menegangkan situasi antara muslim dan non-muslim.

Situasi yang berbeda juga terjadi selama pemerintahan Usman bin Affan. Usman berhasil mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya selama enam tahun pertama, tetapi pada tahun kedua, terjadi perpecahan di masyarakat. Ini karena Usman memasukkan banyak keluarganya ke dalam pemerintahan (Mustin et al., 2025). Meski begitu, Usman masih dianggap sebagai pemimpin yang membangun hubungan dekat dengan masyarakat melalui musyawarah, dan dia juga dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan dermawan. Namun, situasi sosial ketika khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat carutmarut. Pada saat umat Islam pertama kali bersatu di bawah satu kepemimpinan, muncul kelompok oposisi yang dipimpin oleh sahabat yang kuat, seperti Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah binti Abu Bakar, yang menuntut pembunuh Usman diusut tuntas. Kemudian muncul perlawanan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menolak berbaiat pada Ali sampai pembunuh Usman ditangkap dan dihukum (Mulyani et al., 2025). Sulit bagi umat Islam untuk memberikan dukungan penuh kepada Ali bin Abi Thalib sesuai dengan keadaan saat ini. Setelah peristiwa tahkim (arbitrase), perselisihan menjadi lebih buruk.

Bidang Keilmuan

Di bidang keilmuan dan pendidikan ketika Abu Bakar memimpin masih sama dengan masa Rasulullah (Azwar et al., 2024). Pada masa Abu Bakar, pendidikan dapat berkembang dikarenakan kondisi sosial dan politik yang cenderung stabil ketika itu. Namun, khalifah Umar bin Khattab membangun sudut belajar di masjid. Taman pendidikan Raudhatul Athfal adalah model ini. Umar juga mengirimkan beberapa sahabatnya untuk mengajar di daerah-daerah tersebut. Baitul Maal memberikan kompensasi kepada guru-guru ini. Upah yang diperoleh berkorelasi positif dengan kemampuan guru (Muthoharoh & Aisyah, 2023). Hal ini dilakukan oleh Umar karena

dibutuhkannya banyak tenaga ahli yang kompeten imbas dari semakin luasnya wilayah yang berhasil ditaklukan oleh umat Islam. Kemudian, Al-Qur'an dikodifikasi pada masa khalifah Usman bin Affan. Selain itu, Usman membangun tempat belajar dan mendorong orang menggunakan bahasa Arab dengan baik (Rindra et al., 2023). Sistem pengajaran lebih terstruktur dari sebelumnya. Barulah, Abu Aswad Ad-Du'aly diberi perintah untuk membangun cabang ilmu baru dalam bidang linguistik Arab, yaitu ilmu nahwu, selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (Zulqornaen, 2025). Hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran akan penggunaan dan pelafalan bahasa Arab yang salah.

Politik

Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq mengikuti model pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Baik dari perspektif kebijakan agama maupun hubungan negara. Pemerintahan khalifah Abu Bakar memiliki dampak yang signifikan pada berbagai bagian pemerintahannya. mengenai kebijakan khalifah Abu Bakar, seperti kebijakan agama. Abu Bakar menghadapi ancaman dari umat Islam sendiri pada awal masa kepemimpinannya. Orang-orang Islam memberontak terhadap kepemimpinan beliau, yang menghasilkan murtad, enggan membayar zakat, pengakuan dirinya sebagai nabi, dan pemberontakan dari berbagai kabilah (Rahmat & Mawardi, 2024). Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-shiddiq, pertumbuhan pemerintahan islam sangat dipengaruhi oleh kebijakan kenegaraan. Bidang eksekutif, pertahanan, dan sosial ekonomi membentuk kebijakan tersebut.

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar juga memperkenalkan pembagian kekuasaan yang melibatkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Sebagai eksekutif, ia memegang kendali penuh atas pemerintahan, sementara fungsi yudikatif dipercayakan kepada sahabat-sahabat yang ahli, seperti Umar bin Khattab yang menjadi qadhi di Madinah. Ia juga mengangkat sejumlah sahabat untuk mengelola wilayah dan fungsi administrasi, seperti Abu Ubaidah yang bertugas di baitul mal, Khalid bin Walid sebagai pemimpin militer, serta Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris. Dengan langkah-langkah ini, Abu Bakar berhasil membangun fondasi pemerintahan Islam yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi (Ramzar et al., 2025). Pemerintahan Abu Bakar menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk pembenahan politik, perluasan wilayah Islam, dan penyatuan bangsa Arab dengan sistem pemerintahan sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah, serta melibatkan sahabat-sahabat senior seperti Umar, Utsman, dan Ali dalam pengambilan keputusan penting.

Umar meneruskan upayanya untuk membentuk kedaulatan Islam hingga berdiri tegak setelah Abu Bakar menyelesaikan tugasnya sebagai khalifah. Keberhasilannya dalam berbagai bidang menunjukkan keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan Umar yang didirikan atas musyawarah (Siregar & Harahap, 2025). Hal ini tidak lain karena dilandasi rasa tanggung jawab kepada Allah SWT. Umar membentuk majelis permusyawaratan untuk memecahkan masalah negara dan umum (Rohadi & Fitriyadi, 2024). Ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin operasional atau kepala negara dengan membentuk sejumlah struktur organisasi di bawah kepemimpinannya, yaitu:

Bidang Pemerintahan

1. Al-Khilafah, yakni posisi sebagai pemimpin tertinggi negara.
2. Al-Wizarat, yaitu jabatan yang setara dengan menteri.
3. Al-Kitabaat, yaitu lembaga sekretariat negara.

Bidang Administrasi Kenegaraan

1. Mendirikan berbagai Departemen (Lembaga Utama Negara), meliputi:
 - a. Diwan Al-Jundi, lembaga yang menangani keamanan dan pertahanan.
 - b. Diwan Al-Kharaj, lembaga yang mengatur keuangan atau baitul maal.
 - c. Diwan Al-Qadha', yaitu lembaga yang mengurus urusan peradilan.
2. Membentuk tata kelola pemerintahan dalam negeri, dengan membagi delapan provinsi: Madinah, Makkah, Syam, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Seluruh provinsi tersebut diberi sistem administrasi khusus serta kewenangan dan otonomi bagi para amir sebagai pemimpin wilayah.

Umar juga mendorong ekspansi. Ekspansi ini melibatkan beberapa pertempuran dalam menghadapi kekuatan Persia, seperti pada pertempuran di Namarraq, al-Jasr, Qadisiya, dan Jalula, kaum Muslim berhasil menaklukkan kawasankawasan tersebut. Penguasaan wilayah itu memungkinkan negara Islam untuk memperluas kekuasaannya. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong umat Islam terlibat dalam pertikaian tersebut. Salah satunya adalah demi menjaga ketertiban dan keselamatan wilayah, sebab kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Raja Khusroes II dianggap menjadi ancaman bagi keamanan, menghasut perang melawan Madinah dan menghina utusan Nabi Muhammad. Kedua, wilayah Persia, terutama Irak, yang dikelilingi oleh sungai Tigris dan Eufrat, adalah wilayah yang makmur dan dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada negara. Umar bin Khatab juga menyerbu Konstantinopel. Syria, Palestina, dan Mesir adalah bagian dari wilayah Romawi Timur yang dikenal sebagai Byzantine, pimpinan Kaisar Heraclius (Lestari et al., 2025). Dua sumber utama permusuhan adalah perlakuan buruk Bizantium sebagai negara tetangga dan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Faktor ekonomi juga berpengaruh. Daerah yang dikuasai Bizantium, seperti Syria, Mesir, dan Palestina, dikenal makmur dan subur, sedangkan sebagian besar wilayah Arab adalah gurun, membuatnya menarik untuk ditaklukan.

Sistem pemerintahan tetap menggunakan sistem khilafah, yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin tertinggi baik dalam urusan agama maupun negara, selama pemerintahan Utsman bin Affan. Namun, dalam praktiknya, Utsman melakukan sejumlah reformasi dan penguatan dalam struktur pemerintahan untuk menyesuaikannya dengan kemajuan zaman, terutama karena meluasnya wilayah kekuasaan I Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai orang pertama yang secara resmi membentuk angkatan laut Islam dalam hal pertahanan dan ekspansi militer. Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan strategis untuk mengamankan wilayah-wilayah pesisir dan mengimbangi kekuatan maritim Kekaisaran Bizantium yang mendominasi Laut Tengah saat itu. Angkatan laut ini terbukti efektif, khususnya dalam ekspedisi-ekspedisi militer di wilayah-wilayah seperti Siprus, Asia Kecil, dan

peisir Afrika Utara (Lestari et al., 2025). Keberhasilan ini memperkuat posisi politik dan ekonomi umat Islam di kawasan tersebut serta menjadi tonggak baru dalam sejarah militer Islam, yang sebelumnya lebih fokus pada kekuatan darat. Dengan reformasi dan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintahan Utsman bin Affan menjadi masa transisi penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Islam.

Saat Usman dibiayai dan menjadi khalifah resmi, dia mengganti gubernur, yang biasanya dari klan Umayyah. Salah satu dari mereka adalah Walid bin 'Uqbah, saudara seibu Usman, yang menjabat sebagai gubernur Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqash. Abdullah bin Amir, anak paman Usman, mengambil alih posisi gubernur Basrah dari Abu Musa al-Asy'ari. Marwan bin Hakam, sepupu Usman, juga diangkat menjadi sekretaris negara. Meskipun Mu'awiyah bin Abi Sufyan tetap menjabat sebagai gubernur Syams, kekuatan dan kekuasaan Mu'awiyah semakin meningkat (Murtiningsih, 2018). Kebijakan Usman dikritik karena menunjuk keluarganya sebagai pejabat negara. Sampai akhir hayatnya, ini memicu demonstrasi dan pemberontakan. Sejak awal pemerintahannya, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Aisyah, Zubair, dan Thalhah.

Bukan hanya masalah keadilan atas pembunuhan Utsman yang menyebabkan pemberontakan ini, tetapi juga karena konflik politik dan ketidakpuasan yang muncul di kalangan sahabat dan masyarakat. Serangkaian pemberontakan melanda pemerintahan Ali bin Abi Thalib setelah dia menjabat sebagai khalifah. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bergabung dengan Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah dalam pemberontakan pertama, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman (Hasibuan et al., 2024). Meskipun Zubair dan Thalhah adalah orang pertama yang berbaiat kepada Ali, mereka merasa kecewa karena harapan mereka untuk diangkat sebagai gubernur Irak dan Yaman tidak terpenuhi. Pasukan Aisyah kalah dalam Pertempuran Unta, di mana Zubair dan Thalhah gugur. Kemudian Aisyah dikawal kembali ke Madinah atas perintah Ali. Setelah itu, Pertempuran Siffin terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang memecah umat Islam menjadi tiga kelompok: Khawarij, pengikut Muawiyah, dan yang setia kepada Ali. Perpecahan ini berlanjut hingga Abd al-Rahman bin Muljam dari kelompok Khawarij membunuh Ali pada tahun kelima kekhalifahannya.

Ekonomi

Hanya ada satu dirham di perbendaharaan negara setelah Abu Bakar As-Shiddiq meninggal, karena harta Baitul Mal diberikan langsung kepada seluruh kaum Muslimin selama pemerintahannya. Semua orang Muslim diberi bagian yang sama dari pendapatan negara pada masa Abu Bakar. Jika pendapatan naik, semua orang Muslim mendapat manfaat yang sama, dan tidak ada yang tertinggal dalam kemiskinan (Akbar et al., 2022). Meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan dan mengurangi disparitas ekonomi akan menjadi hasil dari kebijakan ini. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khalifah Abu Bakar as Shidiq menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang mengikuti Rasulullah, termasuk yang berikut:

- a. Karena prinsip kesamarataan digunakan dalam pembagian harta Baitul Mal, harta tidak pernah disimpan untuk waktu yang lama selama pemerintahan Abu bakar As Shidiq, karena semuanya diberikan langsung kepada kaum muslim.
- b. Memprioritaskan penghitungan zakat yang akurat Mengatur pembagian tanah dari hasil taklukan.
- c. Mengambil tanah dari orang yang murtad untuk digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, muncul sejumlah persoalan yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kestabilan negara. Salah satu tantangan terbesar adalah akibat dari perang Riddah (pemberontakan) yang meletus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Konflik tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas perdagangan, proses produksi, serta alur distribusi ekonomi di berbagai daerah kekhalifahan (Zein et al., n.d.). Pada masa Umar bin Khattab, mengumumkan beberapa kebijakan ekonomi yang akan diterapkan selama masa kepemimpinannya (At-Tazkia & Iqbal, 2025). Dasar-dasar kebijakan ekonomi pada pemerintahannya adalah sebagai berikut :

1. Negara hanya dapat mengambil kekayaan umum sesuai dengan hukum syara'. Mereka tidak dapat mengambil hasil kharaj (pajak tanah) atau harta fa'i (harta rampasan tanpa perang) kecuali melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum syara'.
2. Negara berkomitmen untuk meningkatkan subsidi, melunasi hutang, dan memberikan hak atas kekayaan umum, dengan ketentuan bahwa semua anggaran harus sesuai dengan haknya.
3. Hanya kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan ketentuan syara' yang dapat diterima oleh negara.
4. Negara harus menggunakan kekayaan mereka dengan cara yang sesuai dengan aturan syara'.

Dengan segala kesalehan dan kecerdasan yang dimilikinya, Khalifah Umar bin Khattab telah membawa banyak kemajuan dan pembaharuan di bidang ekonomi (Adiyes Putra et al., 2022), diantaranya :

1. Umar ra menetapkan tiga tingkatan jizyah untuk ahluz zhimmi dan menghentikan pembagian bagian zakat untuk salah satu ashnab, yaitu para muallaf..
2. Umar ra juga menetapkan "Usyur" (pajak) yang dipungut di pos-pos perbatasan.
3. Ali ra meminta zakat kuda, yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Pemerintahan Utsman bin Affan menerapkan politik ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat (Fahrani et al., 2023), diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijakan ekonomi-politik yang berlandaskan ajaran Islam.
2. Penetapan sistem pajak yang bersifat adil.

3. Kaum Muslim diwajibkan menunaikan zakat dari sebagian harta yang telah mencapai batas tertentu, lalu disalurkan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai bentuk pemenuhan hak-hak manusia.
4. Golongan non-Muslim Dhimmi dikenakan jizyah, yang kemudian disimpan di baitul mal untuk berbagai kebutuhan administratif. Selain itu, hak mereka juga diperlakukan secara adil.

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pemilik kawasan hutan diwajibkan membayar pungutan sebesar 4.000 dirham. Selain itu, Ibnu Abbas yang berada di Kufah diberi wewenang untuk memungut zakat atas berbagai rempah dan bahan masakan, termasuk sayur-sayuran segar. Ali juga membagikan dana masyarakat dengan pembagian yang adil. Untuk penempatan dan pembiayaan pegawai negeri sipil, termasuk pegawai daerah, bahkan untuk membiayai konstruksi sungai, jembatan, saluran air, dan mata air memerlukan dana dari pendapatan daerah. Akibatnya, gubernur dengan tanggung jawab umum harus mendapatkan dana dari otoritas pajak atau mempekerjakan karyawan khusus untuk proyek tersebut, jika wilayah pajak atau Baitul Mal berbeda dari wilayah umum. Dana untuk pekerjaan dan perlengkapan diambil dari pendapatan daerah oleh kantor pajak dalam kasus swasembada (Rahma Aulia Hasanah et al., 2023). Dan daerah memiliki pajak dan kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, pengelola dan pejabat daerah tidak boleh memindahkan dana mereka dari wilayah mereka ke Madinah atau Kufah kecuali kebutuhan daerah terpenuhi dan dana tersedia.

Kesimpulan dan Saran

Periode Khulafa' ar-Rasyidun, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, adalah waktu di mana peradaban Islam didirikan setelah kematian Rasulullah SAW. Periode ini ditandai dengan upaya gigih untuk menegakkan konsep kesetaraan dan keadilan, terutama dalam hal strata sosial dan pembagian harta benda (ekonomi), meskipun mereka juga menghadapi tantangan dan konflik internal yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu, terutama pada masa Usman dan Secara politik, Abu Bakar meletakkan dasar untuk pemerintahan sentralistik yang sederhana; Umar bin Khattab kemudian memperluasnya dengan membangun organisasi dan departemen yang kompleks (seperti Diwan Al-Jundi dan Diwan Al-Kharaj), didorong oleh ekspansi wilayah yang besar.

Di bidang keilmuan, terjadi kemajuan dari metode pengajaran di masjid (Umar), kodifikasi Al-Qur'an (Usman), dan peletakan dasar ilmu linguistik Arab (ilmu nahwu) pada masa Ali. Namun, periode ini berakhir dengan konflik politik yang mendalam, seperti Perang Unta, Perang Siffin, dan peristiwa Tahkim, yang memicu perpecahan umat. Peneliti yang akan datang akan berkonsentrasi pada analisis komparatif yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan desentralisasi Umar berpengaruh terhadap konflik sentralisasi dan desentralisasi yang muncul selama masa Usman dan Ali. Peneliti juga akan menyelidiki hubungan antara kebijakan ekonomi kesamarataan (Abu Bakar dan awal Ali) dan meningkatnya ketidakpuasan politik dan sosial (terutama

selama masa Usman), yang mungkin disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam sistem politik.

Daftar Pustaka

- Adiyes Putra, P., Nurhasanah, & Sidiqqi, M. (2022). PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB TENTANG EKONOMI DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMMAT DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Ribhu*, 5(1). <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i1.649>
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
- Al Ayyubi, I. I., Fauziah, Z., Arifah, H., Hartati, R. dewi, & Herdiansyah, R. (2024). STUDI KOMPARATIF DINAMIKA KEPEMIMPINAN KHULAFUR RASYIDIN. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 5. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i01.141>
- Ambiya, L. N., Rohman, I. N., & Assondani, M. M. N. U. (2024). Principles of Politics in Islam Based on the Qur'an and Their Application During the Caliphate Era: Prinsip-Prinsip Politik Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Penerapan Pada Masa Kekhalifahan. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.1515>
- At-Tazkia, S., & Iqbal, I. (2025). SISTEM EKONOMI PADA ZAMAN KHULAFAH UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1860>
- Azwar, M., Zuhrah, N., Auliana, T., Mariddin, G. S., & Sofia. (2024). Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Khulafaurasyidin. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 65–75. <https://doi.org/10.61253/j46kqw35>
- Bashayev, M. S. (2024). Dinamika Sosial dan Ujaran Kebencian di Zaman Khalifah Umar: Pelajaran untuk Masa Kini. *Crossroad Research Journal*, 1(4), 190–209. <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.214>
- Fahrani, I., Suryana, D. F., Ismail, A. S., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman bin Affan dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.247>
- Faisal, F., Mukti, A., & Dahlan, Z. (2022). PERSEPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK TERHADAP KEBANGKITAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI KEPEMIMPINAN ABU BAKAR AL- SHIDDIQ DAN UMAR IBN AL-KHATTAB. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(3). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i3.55>
- Fauziyah, P., & Kurniawan, R. (2022). SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDIQ. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/b7fxa>

- Hasibuan, N. H., Afrizal, A., & Sawaluddin, S. (2024). Ali bin Abi Thalib: Kekhalifahan di Tengah Tiga Pemberontakan Besar. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 514–525. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3009>
- Kadenun, K. K. (2021). PROSES PERALIHAN KEKUASAAN DAN KEBIJAKSANAAN DALAM PEMERINTAHAN KHULAFURRASYIDIN. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1(2), 1–27. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>
- Lestari, U. F., Afrizal, Syawaluddin, & Lestari, W. (2025). UMAR IBN KHATAB EXPANSI DAN REALISASI PENCAPAIAN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 282–294. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.29000>
- Muftaza, I. Z. N., & Aziz, M. I. (2023). Kelas Sosial dalam Masyarakat Islam Periode Klasik (Dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(01), 81–92. <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.7908>
- Muharrom, M. F. (2024). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(1), 103–116. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.376>
- Mulyani, M., Wahyuni, S., Lestari, A. R., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., & Masripah, masripah. (2025). View of Sejarah Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam. *ARJI: Action Research Journal Indonesia*. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.345>
- Murtiningsih, M. (2018). TUDUHAN NEPOTISME TERHADAP UTSMAN BIN AFFAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEKHALIFAHAN ALI BIN ABI THALIB. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1). <https://doi.org/10.19109/jia.v19i1.2385>
- Mustin, H., Darussalam, S., & Sulaiman, U. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2112>
- Muthoharoh, M., & Aisyah, S. (2023). KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR ROSYIDIN. *ILJ: Islamic Learning Journal*, 1(2), 306–322. <https://doi.org/10.54437/iljislamiclearningjournal.v1i2.879>
- Nurjanah, E. (2023). Ekspansi Islam dan Kebijakan Pemerintahan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Jurnal Sejarah Islam UINSAIZU*, 2(1). <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.6991>
- Patoni, P. (2023, July 27). Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah secara Damai. *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-098bm>
- Rahma Aulia Hasanah, Rodiatul Husna, Gafa Anjasya, Fikri Azka Tanjung, & Masleni Nasution. (2023). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.700>

- Rahmat, A. L., & Mawardi, K. (2024). Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 30–41. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3708>
- Ramzar, A., Harahap, M. H., & Kamil, T. N. A. (2025). PEMIKIRAN POLITIK PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 44–49. <https://doi.org/10.69714/98w93t84>
- Rindra, A. S. P., Alimni, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Utsman Bin Affan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam. *JPT : Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.62159/jpt.v4i2.835>
- Rohadi, & Fitriyadi, M. (2024). Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab: Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 1(1), 121–128. <https://doi.org/10.59653/hjm.v1i1.121>
- Siregar, N., & Harahap, A. S. (2025). KEPEMIMPINAN MASA KHULAFAR-RASYIDIN ABU BAKAR AS-SHIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB. *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 1(4), 1–12. <https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v1i4.566>
- Sunnatullah, S. (2022, July 16). Mengenal Khulafaur Rasyidin dan Masa Kepemimpinannya. *NU Online*. <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/mengenal-khulafaur-rasyidin-dan-masa-kepemimpinannya-KWL25>
- Zein, A. W., Handayani, D., Febriyano, F., & Admaja, Y. (n.d.). POTRET PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA MASA AL-KHULAFAR-RASYIDIN. Retrieved September 22, 2025, from <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/download/2914/2640>
- Zulqornaen, F. A. (2025). Pengaruh Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Lahirnya Ilmu Nahwu: Studi Sejarah Awal Pembentukan Kaidah Bahasa Arab. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(3), 275–290. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.206>